

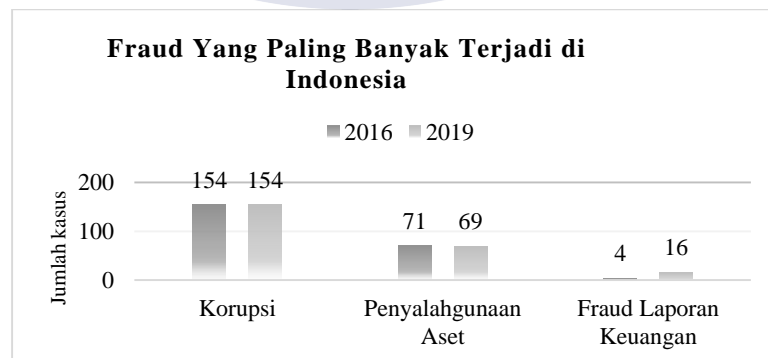
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis selalu berada dibawah bayang-bayang penipuan. Bagi para investor ataupun pelaku dalam pasar modal, penipuan menjadi kekhawiran terbesar mereka apalagi yang menyangkut informasi pelaporan keuangan perusahaan publik. Informasi laba adalah informasi paling umum digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu elemen penilaian kinerja perusahaan yang diperoleh dalam laporan keuangan perusahaan (Priswita & Taqwa, 2019). Oleh karena itu, manajer akan berupaya keras meningkatkan kinerja perusahaan sesuai ekspektasi pemangku kepentingan meskipun harus melanggar kode etik melalui manipulasi laporan keuangannya. (Suhendah, 2019)

Kecurangan laporan keuangan sesuai dengan SA 204 adalah kesalahan penyajian yang timbul sebagai akibat penghilangan atau pengungkapan yang disengaja oleh manajemen atas laporan keuangan guna mempengaruhi persepsi pengguna laporan keuangan. *Fraud Magazine* terbitan ACFE menyebutkan beberapa kasus *fraud* meliputi *Wirecard*, *FinCen Files*, *Airbus* serta *Luckin Coffee* yang menjadi skandal *fraud* terkenal dunia baru-baru ini karena para eksekutif dalam perusahaan tersebut telah melakukan tindakan ilegal seperti suap, penipuan akuntansi, manipulasi pasar dengan kerugian yang diperkirakan lebih dari milyaran dolar (Ayres & Wilder, 2021). Selain kerugian besar yang ditanggung perusahaan, skandal *fraud* tersebut menyebabkan rusaknya reputasi perusahaan hingga pada ancaman kebangkrutan.

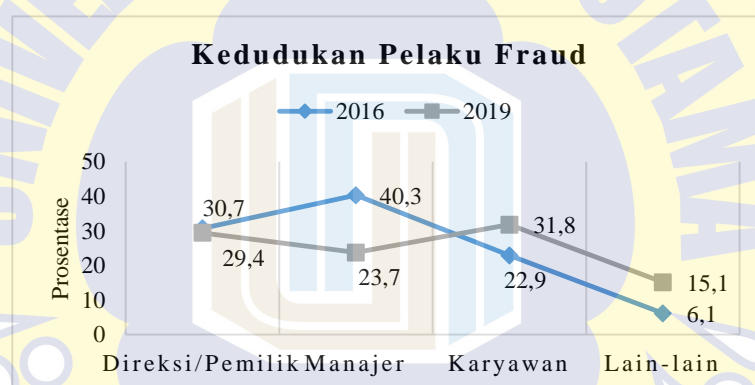
Sama halnya dengan negara lain, Indonesia juga menjadi negara yang belum terbebas dari tindakan *fraud*. Menurut ACFE dalam Survei *Fraud* Indonesia terdapat tiga kategori *fraud* sering terjadi di Indonesia yaitu korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan seperti yang di ilustrasikan dalam bagan berikut.



Sumber: diolah dari Survei Fraud Indonesia 2016 dan 2019, ACFE

Gambar 1.1 Fraud Yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia pada 2016 dan 2019

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa menurut hasil survei yang dilakukan ACFE mengenai *fraud* yang sering terjadi di Indonesia diketahui bahwa korupsi menjadi jenis *fraud* yang menempati posisi tertinggi di Indonesia dengan kasusnya sebanyak 154 kasus dengan prosentase 67% pada tahun 2016 dan 64,4% pada tahun 2019. Selanjutnya adalah penyalahgunaan aset/kekayaan negara & perusahaan dengan kasus sebanyak 71 kasus atau 31% di tahun 2016 dan 69 kasus atau 28,9 % ditahun 2019. Sementara itu, *fraud* laporan keuangan menempati posisi terakhir dengan kasusnya sebanyak 4 kasus atau 2% di tahun 2016 dan 16 kasus atau 6,7% di tahun 2019. Meskipun *fraud* laporan keuangan memiliki prosentase terkecil dari dua jenis *fraud* lainnya, namun *fraud* laporan keuangan menjadi satu-satunya kategori *fraud* yang mengalami peningkatan sebesar 4,7% direntang waktu empat tahun. Apalagi *fraud* laporan keuangan menjadi jenis *fraud* yang banyak ditemukan dalam kasus yang berkaitan dengan perusahaan.



Sumber: diolah dari Survei Fraud Indonesia 2016 dan 2019, ACFE

Gambar 1.2 Kedudukan Pelaku Fraud pada 2016 dan 2019

Sedangkan dalam gambar 1.2 menunjukkan bahwa peningkatan pelaku *fraud* terjadi pada karyawan dan kedudukan lainnya yang secara berurutan mencapai 31,8% dan 15,1% di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2016 berada di angka 22,9% dan 6,1%. Sementara itu direksi/pemilik dan manajer sebagai pihak manajemen yang melakukan segala pengurusan terhadap aktivitas perusahaan mengalami penurunan prosentase dalam tindakan *fraud* sebesar 17,9% selama empat tahun di tahun 2016 hingga 2019. Meskipun pihak manajemen tersebut mengalami penurunan prosentase, namun jumlah direksi dan manajemen tetap mendominasi sebagai pelaku *fraud*. Sesuai dengan asumsi teori agensi yang menyatakan bahwa seorang manajer (agen) dengan kewewenangan penuh atas pemegang saham (prinsipal) dalam pengelolaan perusahaan mendapat akses informasi berlebih yang membuka kesempatan manajer melakukan tindakan kecurangan demi keuntungan dirinya atau golongan (Ramadhany, 2017). Keadaan ini

menunjukkan tentang lemahnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan akibat kurang efektifnya sistem tata kelola perusahaan di Indonesia.

Tata kelola yang buruk bukanlah hal yang baru terjadi dalam sebuah perusahaan. Adanya toleransi budaya korupsi dan kecurangan yang diakibatkan oleh buruknya tata kelola perusahaan menjadi kontributor utama dalam krisis moneter di kawasan Asia tahun 1990-an termasuk Indonesia. Sejak peristiwa tersebut pemerintah melakukan berbagai reformasi dan kebijakan dalam memulihkan keadaan pasca krisis dan terus meningkatkan stabilitas pasar modal dengan mendorong penerapan *good corporate governance* (OJK, 2016).

Penerapan tata kelola yang baik pada perusahaan publik telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 yang menyatakan bahwa perusahaan publik diwajibkan untuk mengimplementasikan pedoman tata kelola yang baik didalam praktik bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di perusahaan seperti independensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran menjadi salah satu upaya dalam meminimalkan tindakan kecurangan pada pelaporan keuangan (Sanusi, Sutrisno, & Suwiryo, 2019). Pelaksanaan tata kelola yang baik juga mampu menciptakan kegiatan pengelolaan perusahaan yang lebih terarah dan jelas dalam hal tanggung jawab, pemisahan tugas dan pengawasan (Ramadhany, 2017). Untuk mencapai hal tersebut, peranan penting organ perusahaan seperti *dewan komisaris independen* dan komite audit yang efektif serta keberadaan kepemilikan manajerial akan mendukung keberhasilan pelaksanaan mekanisme tata kelola yang baik di perusahaan.

Dalam mencapai standarisasi dewan perusahaan yang efektif mencegah tindakan kecurangan atau penipuan maka struktur dewan harus diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pihak-pihak yang independen agar setiap pengambilan keputusan dalam penugasannya sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (Khameswary, 2019). Pihak independen yang dimaksud adalah pihak dalam organ perusahaan yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan atau pemegang saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen menjadi pihak yang berada di jajaran dewan yaitu dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Sifat independensi yang dimiliki komisaris independen akan menghasilkan keputusan yang obyektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi. Hasil penelitian Rengganis, et al (2019) menemukan bahwa

keberadaan komisaris independen yang meningkat di dalam dewan komisaris perusahaan akan membantu menurunkan terjadinya kecurangan didalam perusahaan. Namun Wicaksono & Chariri (2015) mengungkapkan tidak adanya hubungan secara langsung dengan perusahaan membuat komisaris independen tidak dapat memberikan pendapatnya dengan maksimal sehingga fungsi pengawasannya tidak akan berjalan dengan efektif. Sedangkan Mahesarani & Chariri (2016) menyatakan jumlah komisaris independen tidak efektif dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan akibat belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap pihak manajemen suatu perusahaan.

Bagian dari dewan lainnya yaitu komite audit memiliki peranan penting sebagai pemeriksa dan penyeimbang yang independen dalam berjalannya fungsi audit internal dan memastikan integritas atas laporan keuangan perusahaan (Hall & Singleton, 2007). Proses monitoring komite audit terhadap laporan keuangan akan menjaga keandalan dalam pelaporan keuangan perusahaan (Restuningdiah, 2011). Agar fungsi pengawasannya bersama dewan komisaris dapat berjalan dengan baik, komite audit membutuhkan karakteristik seperti independensi, keahlian keuangan, frekuensi rapat dan masa jabatan yang memadai dalam anggotanya. Komite audit independen merupakan anggotan komite audit berasal dari pihak luar dan tidak ada hubungan afiliasi dengan perusahaan sehingga komite audit independen ini dipandang memiliki sikap independensi yang lebih baik dibanding dengan anggota komite audit lainnya (Handoko & Ramadhani, 2017). Adanya komite audit independen di struktur komite audit akan efektif mencegah tindakan kecurangan laporan keuangan (Dewi, 2019). Karakteristik berikutnya yang juga mendukung fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan yaitu komite audit yang dilengkapi dengan anggota yang memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan dibidang akuntansi dan keuangan. Keahlian keuangan dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena kemampuannya dalam memberikan penilaian dan solusi yang tepat atas masalah pada laporan keuangan sehingga kemungkinan kecurangan laporan keuangan dapat ditekan (Handoko & Ramadhani, 2017). Selain itu, intensitas rapat yang diadakan komite audit akan menjadi kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan yang efektif untuk memperkecil tindakan menyimpang manajer (Prasetyo, 2016). Semakin tinggi frekuensi rapat komite audit berpengaruh dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan di suatu perusahaan (Rengganis, et al., 2019). Masa jabatan juga merupakan karakteristik penting dari komite audit yang dapat mempengaruhi keefektifan pengawas

atas laporan keuangan perusahaan. Masa jabatan anggota komite audit yang lebih pendek akan mengakibatkan kinerja yang kurang efektif karena kurangnya pengalaman terhadap perusahaan (Prasetyo, 2016). Semakin lama masa jabatan komite audit terbukti mampu menurunkan kecurangan laporan keuangan (Meliala, 2018).

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu proksi penting dalam menciptakan tata kelola yang baik. Pemegang saham yang berasal dari internal perusahaan akan lebih memperhatikan efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Adanya kesamaan kepentingan seperti pemegang saham lainnya memungkinkan manajer tersebut untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih fokus pada keputusan jangka panjang (Meliala, 2018). Hal ini akan membantu dalam mengurangi tindakan menyimpang dalam manajemen seperti manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Menurut Larune, et al (2021) manajemen dengan kepemilikan saham di perusahaan terbukti dapat mempengaruhi tindakan kecurangan laporan keuangan.

Selain proksi *corporate governance* yang efektif dalam mencegah kecurangan, faktor lain pada perusahaan yang mempengaruhi kecurangan dapat diketahui dari rasio *leverage* perusahaan. Wahyudi, et al (2019) menemukan bahwa rasio leverage yang besar mampu menurunkan kecurangan keuangan karena manajemen tidak melakukan manipulasi laba dengan memperkecil *leverage* tersebut. Dengan tingginya hutang akan membuat perusahaan semakin memperketat pengawasannya terhadap pengendalian utang (Dewi, 2019).

Selanjutnya ukuran perusahaan menjadi faktor yang menentukan besar kecilnya transaksi dan informasi bisnis di suatu perusahaan (Handoko & Ramadhani, 2017). Akibat hal ini perusahaan besar cenderung memiliki konflik kepentingan yang tinggi, sehingga manajemen yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan memiliki kesempatan besar bertindak oportunistik dengan melakukan manipulasi terhadap pelaporan keuangan. Hasil penelitian Dewi (2019) menyebutkan semakin besar ukuran perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan akibat timbulnya biaya agensi yang tinggi.

Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari penelitian Dewi (2019) dimana tujuan dilakukan analisisnya adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas tata kelola perusahaan yang terdiri atas variabel komisaris independen, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan

keuangan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin menguji kembali semua variabel-variabel yang diteliti Dewi (2019) dengan menambahkan variabel independen baru sesuai penelitian Meliala (2018) yaitu masa jabatan komite audit karena hasil yang ditemukan telah membuktikan jika perusahaan memiliki rata-rata komite audit dengan masa jabatan yang lama, dianggap memiliki pengalaman serta kemampuan yang baik sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan kecurangan laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan data dari *annual report* perusahaan manufaktur di BEI dalam jangka waktu tiga tahun dari tahun 2017 hingga 2019. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan tersebut rata-rata memiliki laporan keuangan yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan sektor perusahaan manufaktur tercatat di BEI memiliki ragam variasi sehingga mampu mewakili keadaan perusahaan publik pada umumnya. Sedangkan untuk pengelolaan data akan di proses menggunakan analisis regresi logistik dengan bantuan aplikasi *IBM SPSS Statistic 25*.

Berdasarkan literatur dan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk menjadikannya sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Karakteristik Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adanya fenomena dan inkonsistensi akan hasil penelitian-penelitian terdahulu menimbulkan suatu *research gap* atau celah penelitian yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah rapat komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
9. Apakah komisaris independen, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, masa jabatan komite audit, kepemilikan manajerial, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh komite audit independen terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh masa jabatan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan.
7. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh *leverage* terhadap kecurangan laporan keuangan.
8. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan.
9. Untuk mengetahui dan menguji tentang pengaruh komisaris independen, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, masa jabatan komite audit, kepemilikan manajerial, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak diantara lain:

1. Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada perusahaan terutama perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek tentang pentingnya pengaruh komisaris independen, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, masa jabatan komite audit, kepemilikan manajerial, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap kemungkinan tindakan kecurangan laporan keuangan.

2. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan kepada para regulator pasar modal seperti OJK dan Bapepam-LK untuk terus meningkatkan fungsi pengawasannya terkait peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kecurangan laporan keuangan terutama pada perusahaan publik yang ikut berkontribusi di pasar modal.

3. Akademisi atau Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah pembelajaran bagi para akademisi terutama mahasiswa agar memahami pengaruh komisaris independen, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, masa jabatan komite audit, kepemilikan manajerial, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat membantu dan memberikan ide kepada mahasiswa terutama mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama seperti yang dilakukan penelitian ini.

1.5. Batasan Masalah

Agar uraian pada pembahasan tidak keluar dari topik penelitian, maka penelitian ini perlu membatasi masalahnya dengan berfokus pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada indikasi kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh emiten/perusahaan terdaftar berdasarkan *annual report* yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.
2. Faktor-faktor pendukung dalam kecurangan laporan keuangan dapat diketahui pada variabel komisaris independen, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, rapat komite audit, masa jabatan komite audit, kepemilikan manajerial, yang berperan sebagai pemantau/mitigasi aktivitas menyimpang perusahaan sehingga dapat mengurangi ataupun mengungkapkan kecurangan laporan keuangan di perusahaan. Variabel *leverage* juga dapat menjadi faktor yang menurunkan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sedangkan variabel ukuran perusahaan menjadi faktor yang dapat mengungkapkan atau menurunkan adanya kemungkinan kecurangan laporan dalam perusahaan. Secara keseluruhan, faktor-faktor pendukung ini dapat mempengaruhi kepatuhan dan keterbukaan informasi pada pelaporan laporan keuangan dan dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.
3. Penelitian ini menggunakan pengukuran skala rasio, skala nominal dan skala dummy dalam menentukan perhitungan setiap variabelnya. Untuk pengujiannya sendiri, penelitian ini menggunakan metode analisis *regresi logistik* dan bantuan software *IBM SPSS Statistic 25*.
4. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tiga tahun yakni periode 2017-2019. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut sebagian besar telah memiliki laporan keuangan yang memenuhi kriteria dan mampu mewakili keadaan perusahaan publik pada umumnya.